



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 16 Juli 2021

Halaman: 10

► PEMBATASAN KEGIATAN

Kompak PPKM Darurat Tak Diperpanjang

JOGJA-PPKM
Darurat melumpuhkan nyaris semua sektor perekonomian di DIY, tak terkecuali hotel yang okupansinya drop dan juga pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung. Mereka kompak berharap tak ada perpanjangan PPKM Darurat.

Herliambang Jati Kusuma
herliambang.jati@harianjogja.com

Sejak PPKM Darurat, okupansi hotel berkisar 0-8% saja.

Jika PPKM Darurat diperpanjang, hal yang dikhawatirkan adalah PHK yang masif.

Hingga saat ini, Deddy pun mengaku belum menerima kepastian apapun terkait dengan stimulus ataupun hibah. Diharapkan ada berbagai keringanan mulai dari biaya beban listrik, hingga kelonggaran terkait dengan pembayaran BPJS, karena saat ini pemasukan dapat dikatakan tidak ada.

Deddy mengatakan selama ini PHRI DIY juga telah berupaya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mulai dari verifikasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi, tentunya juga vaksinasi telah dilakukan. "Kami harap tidak ada perpanjangan lagi, kesehatan dan ekonomi sama-sama kehabisan oksigen saat ini," ucapnya.

Ancaman PHK
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, sekaligus pengamat pariwisata, Ike Janita Dewi mengatakan dengan PPKM Darurat ini banyak pelaku usaha pariwisata sudah pasrah, menunggu pandemi reda.

"Semua tidak ada penjualan sama sekali. Dikhawatirkan tentu adanya gelombang PHK. Sebelumnya sebetulnya sudah ada kebijakan *unpaid leave*, tetapi sekarang yang harus diantisipasi adalah PHK, mudahnya tidak dalam skala yang masif," ucapnya.

Dikatakannya, pemerintah perlu memberikan insentif pengurangan biaya operasionalisasi atau *fixed costs* dan akses pembiayaan atau permodalan. Bantuan mitigasi untuk tenaga kerja yang sangat terdampak perlu dilakukan, misalnya dengan Bansos.

"Karena pelaku wisata sudah banyak yang menggunakan dana pribadi, hutang sana-sini, menjual aset," ujar Ike.

Senada, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI) DIY, Surya Ananta mengkhawatirkan dampak yang lebih besar pada ekonomi jika PPKM Darurat diperpanjang.

"Untuk online jika dibandingkan dengan penjualan langsung masih jauh sekali. Lebih pada *service* kepada *customer*, nilai bisnis sendiri tetap berkurang. Tren ke depan katakanlah makin panjang lagi PPKM Darurat, jujur makin berat," ucap Surya, Kamis.

Ananta mengatakan kondisi saat ini semua aktivitas dilakukan *work from home* (WFH), hampir tidak ada aktivitas di mal. Ia mengkhawatirkan dengan tidak adanya pemasukan untuk para *tenant* berpengaruh pada pekerja. Pasalnya tidak semua biaya *maintenance* dapat dinolkan.

Dia mengatakan jika hanya sampai rencana awal PPKM Darurat yaitu Selasa (20/7), kondisi usaha dirasanya masih kuat. Kekawatiran yang muncul, jika rencana awal berubah, dan lebih panjang diberlakukan.

"PHK adalah opsi terakhir, kalau tidak segera ada *income*. Kami mendukung dengan PPKM Darurat saat ini, tetapi kami berharap tidak diperpanjang."

AWAS CORONA!

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005